

Ringkasan Program dan Kegiatan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Unit Kerja	Pagu Anggaran	Sumber Anggaran	Pelaksanaan
1	Program Komunikasi Publik	Meningkatnya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses Informasi Tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	75	IKP	196.527.457,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Konten Informasi Tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	75				
			Persentase (%) tingkat kepuasan masyarakat di wilayah IT terhadap informasi publik	70				
			Persentase (%) berita hoax yang berhasil dikonter	75				
			Persentase (%) K/LD yang sudah melaksanakan urusan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PKIP) sesuai dengan peraturan yang berlaku	90				
			Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023	76				
		Meningkatnya kualitas tata kelola informasi dan komunikasi publik	Jumlah regulasi/kebijakan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/LD yang ditetapkan	11	IKP	61.933.365,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
		Meningkatnya kualitas pengelolaan media komunikasi	Indeks Kemendekam Pers	78	IKP	40.918.671,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Jumlah TV dengan Indeks Kualitas Program Siaran di atas 3	15				
			Persentase (%) pelayanan informasi dan pelastarian bidang pers dan komunikasi dan informasi	100				
2	Program Komunikasi Publik	Meningkatnya jangkauan penyebaran informasi dan program prioritas pemerintah	Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi program prioritas pemerintah bidang Polhukam	70	IKK	148.061.000,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Persentase (%) Berita Hoax yang berhasil dikonter bidang Polhukam	75				
			Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi program prioritas pemerintah bidang PMK	70				
			Persentase (%) Berita Hoax yang berhasil dikonter bidang PMK	75				
			Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi program prioritas pemerintah bidang Perkonsumen dan Maritim	70				
			Persentase (%) Berita Hoax yang berhasil dikonter bidang Perkonsumen dan Maritim	75				
			Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi program prioritas pemerintah bidang Stunting	74				
			Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi program prioritas pemerintah bidang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat	69				
		Meningkatnya kualitas penyebaran informasi publik melalui media yang dikelola pemerintah	Persentase (%) masyarakat yang mengakses informasi program prioritas pemerintah melalui media pemerintah (own media)	70	IKK	30.542.600,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Persentase (%) daerah IT yang dapat mengakses program pemerintah melalui own media	55				
			Persentase (%) masyarakat yang memahami informasi kebijakan dan program pemerintah melalui own media	70				
		Terelelggeranya Layanan pemanfaatan informasi media cetak dan koleksi benda bersejarah bagi masyarakat	Jumlah Pengunjung Monumen Pers Nasional	100.000	IKK	5.000.000,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Jumlah Pameran/diadaig budaya, dan roadshow ke sekolah dalam rangka promosi dan publikasi tentang Monumen Pers	15				
			Jumlah Penutuksutnaan Koleksi Monumen Pers Nasional	9				
		Terelelggeranya Layanan Informasi Benda-benda Bersejarah di Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah Pengunjung Museum Penerangan	130.000	IKK	6.000.000,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Jumlah SportKegiatan Layanan Informasi kepada Masyarakat melalui Museum Penerangan	50				
			Jumlah Pstntan Koleksi Sesuai Konsep Museum Inklusif	17				
3	Program Komunikasi Publik	Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah register sengketa informasi publik yang diselesaikan di tahun berjalan	110	IKK	17.923.857,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Jumlah Badan Publik yang Informatif	130				
			Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik	76				
4	Program Komunikasi Publik	Terevisitasnya Kemendekam Pers Nasional	Persentase (%) jurnalis yang memperoleh peningkatan pemahaman atau Kode Etik Jurnalistik dan aturan terkait pers	98	IKK	29.918.671,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Jumlah wartawan yang terserit kasi jurnalis	1500				
			Jumlah wartawan yang mendapat pelatihan jurnalistik	1680				
			Persentase (%) pemertahan pers yang lolos veri kasi faktual	80				
			Persentase (%) pengalam dan pengisian etika bidang pers yang terselesaikan	90				
			Nilai Indeks Kemendekam Pers	78				
			Jumlah layanan pengembangan pers dan kerja sama dewan pers	1				
			Jumlah peserta yang mengikuti workshop peliputan pemilu	1700				
5	Program Komunikasi Publik	Meningkatnya Kualitas Penyiaran Indonesia	Persentase (%) Pengalam Masyarakat terhadap Konten Siaran TV dan Radio yang Terselamatkan	99	IKK	32.650.472,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Jumlah Lembaga Penyiaran (TV Induk Jaringan, Radio Berjaringan, LPB) yang memenuhi Ketentuan Peraturan Perundangan	59				
			Jumlah TV dengan Indeks Kualitas Program Siaran di atas 3	15				
			Persentase (%) Rekomendasi Keleayakan Lembaga Penyiaran yang ditindak lanjuti dalam Proses Penerbitan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)	90				
			Jumlah kegiatan kelenbangan KPI	3				

6	Program Komunikasi Publik	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Tata Kelola Komunikasi Publik	Jumlah Kajian/Regulasi/ Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di K/L/D	9	IKK	7.162.322,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Jumlah regulasi tentang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP)	1				
			Jumlah NSPK, pengelolaan bidang komunikasi publik yang ditetapkan	5				
			Jumlah Regulasi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik	1				
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya terkait pengelolaan informasi dan komunikasi	75	IKK	22.120.571,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di K/L/D	90				
			Persentase (%) PPD yang meningkat keputusannya melaksanakan fungsi sesuai UU KIP (kumulatif)	50				
			Jumlah Keamatan di Wilayah JT yang menerima layanan informasi publik melalui Petugas Informasi Publik	700				
			Persentase (%) Mitra Strategis (Kelompok Informasi Masyarakat/KIM, Bako Humas, Petugas Informasi Publik/PIP, dll) yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas Nasional	85				
			Tingkat kepuasan JFPH terhadap layanan pembinaan yang dilakukan Komenkominfo sebagai instansi pembina JFPH	70				
7	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Meningkatnya kompetensi dan kemampuan SDM Nasional bidang TIK	Jumlah peserta pelatihan digital skill a. SDM umum (termasuk kawasan prioritas) b. SKKNI	50000	IKP	355.647.675,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Persentase (%) peserta yang lulus program beasiswa S2 dan S3 bidang TIK.Digital yang lulus tepat waktu	90				
			Jumlah ASN Nasional yang mendapatkan pelatihan teknis TIK, fungsional dan manajerial (kumulatif)	2605				
			Jumlah anak usia sekolah, perempuan, disabilitas yang mendapat pengenalan TIK (kumulatif)	1000				
			Persentase (%) Realisasi Target PNPB Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100				
		Terwujudnya Komunitas dan Kenyamanan Masyarakat dalam Menggunakan Internet	Jumlah regulasi / kebijakan dan Implementasi turunan PP 71 tahun 2019	3	IKP	138.100.972,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Maksimal Derasi Pemutusan Akses/Pemblokiran PSE terhadap Konten yang melanggar ketentuan perundangn undangan	3				
			Persentase (%) Penyelenggara Sistem Elektronik yang patuh terhadap UU ITE dan PP 71 Tahun 2019	95				
			Jumlah konten internet (media social, konten negatif, website) yang bisa diunggah per tahun	250000				
			Persentase (%) penyelesaian regulasi PDP dan peraturan turunannya (kumulatif)	100				
			Persentase (%) pengembangan ekosistem PDP nasional (kumulatif)	100				
		Terwujudnya digitalisasi pemerintahan pusat dan daerah	Persentase (%) Aplikasi generik yang dikembangkan secara multipatform (kumulatif)	70	IKP	1.547.759.400,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Persentase (%) jumlah kab-kota yang mengimplementasi sistem informasi keahwarutan dan kebencanaan	30				
			Jumlah penyediaan Pusat Data Nasional	2				
			Jumlah Kab-Kota yang difasilitasi merumuskan masterplan smart city	50				
			Jumlah hasil evaluasi implementasi smart city terhadap kota-kab yang terpilih pada periode 2017-2022 (kumulatif)	248				
			Jumlah Regulasi/Kebijakan terkait Penerapan Jaringan Bergerak Pintar untuk Pelindungan Publik dan Penanggulangan Bencana (PPDR)	1				
		Meningkatnya Tingkat Literasi Masyarakat di Bidang Digital	Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital	5500000	IKP	450.000.000,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
		Meningkatnya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital	Persentase tingkat adopsi teknologi digital di sektor strategis (kumulatif)	100	IKP	123.963.500,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Persentase Kawasan Prioritas yang difasilitasi untuk adopsi teknologi digital (kumulatif)	70				
			Jumlah UMKM yang difasilitasi untuk scale up dari usaha kecil menjadi usaha menengah (kumulatif)	20000				
			Persentase startup digital yang berhasil naik kelas	5				
			Jumlah Start up bidang gim yang berkembang bisnisnya dilihat dari jumlah download/peningkatan pendapatan/jumlah produksi game/jumlah kerjasama bisnis	40				
			Jumlah startup digital skaf yang terbantu (kumulatif)	150				
8	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Meningkatnya Kompetensi SDM Melalui Sertifikasi Vokasi Bidang Kominfo	Jumlah peserta pelatihan dan/atau sertifikasi vokasi bidang Kominfo di BHPSDMP Makassar	1500	IKK	32.236.033,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Jumlah peserta pelatihan dan/atau sertifikasi vokasi bidang Kominfo di BHPSDMP Medan	1500				
			Jumlah peserta pelatihan dan/atau sertifikasi vokasi bidang Kominfo di BPSDMP Jakarta	650				
			Jumlah peserta pelatihan dan/atau sertifikasi vokasi bidang Kominfo di BPSDMP Bandung	650				
			Jumlah peserta pelatihan dan/atau sertifikasi vokasi bidang Kominfo di BPSDMP Yogyakarta	650				
			Jumlah peserta pelatihan dan/atau sertifikasi vokasi bidang Kominfo di BPSDMP Surabaya	650				
			Jumlah peserta pelatihan dan/atau sertifikasi vokasi bidang Kominfo di BPSDMP Banjarmasin	650				
			Jumlah peserta pelatihan dan/atau sertifikasi vokasi bidang Kominfo di BPSDMP Manado	650				
			Jumlah peserta pelatihan dan/atau sertifikasi vokasi bidang Kominfo di BPPTIK	2200				
			Jumlah peserta pelatihan dan/atau sertifikasi vokasi bidang Kominfo di Pusbang Proveri	500				
9	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Meningkatnya Kompetensi SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah peserta pelatihan digital	40000	IKK	210.508.212,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Jumlah anak usia sekolah, perempuan dan/atau disabilitas di wilayah kerja yang mendapat pengenalan TIK (Termasuk Lokasi Kawasan Prioritas) di wilayah kerja BHPSDMP Makassar	150				
			Jumlah anak usia sekolah, perempuan dan/atau disabilitas di wilayah kerja yang mendapat pengenalan TIK (Termasuk Lokasi Kawasan Prioritas) di wilayah kerja BHPSDMP Medan	150				

			Jumlah anak usia sekolah, perempuan dan/atau disabilitas di wilayah kerja yang mendapat pengenalan TIK (Termasuk Lokasi Kawasan Prioritas) di wilayah kerja BPSDMP Bandung	100				
			Jumlah anak usia sekolah, perempuan dan/atau disabilitas di wilayah kerja yang mendapat pengenalan TIK (Termasuk Lokasi Kawasan Prioritas) di wilayah kerja BPSDMP Sumbawa	100				
			Jumlah anak usia sekolah, perempuan dan/atau disabilitas di wilayah kerja yang mendapat pengenalan TIK (Termasuk Lokasi Kawasan Prioritas) di wilayah kerja BPSDMP Yogyakarta	100				
			Jumlah anak usia sekolah, perempuan dan/atau disabilitas di wilayah kerja yang mendapat pengenalan TIK (Termasuk Lokasi Kawasan Prioritas) di wilayah kerja BPSDMP Jakarta	100				
			Jumlah anak usia sekolah, perempuan dan/atau disabilitas di wilayah kerja yang mendapat pengenalan TIK (Termasuk Lokasi Kawasan Prioritas) di wilayah kerja BPSDMP Banjarmasin	100				
			Jumlah anak usia sekolah, perempuan dan/atau disabilitas di wilayah kerja yang mendapat pengenalan TIK (Termasuk Lokasi Kawasan Prioritas) di wilayah kerja BPSDMP Manado	100				
			Jumlah anak usia sekolah, perempuan dan/atau disabilitas di HPPTIK yang mendapat pengenalan TIK (Termasuk Lokasi Kawasan Prioritas)	100				
			Persentase (%) Aparatur Pemerintah yang tersertifikasi bidang e-government dari total peserta pelatihan di HPPTIK	85				
			Persentase (%) Aparatur Pemerintah yang dinyatakan lulus bidang komunikasi dan informatika di Psadiklat	90				
			Jumlah Peta Okupasi dan Rancangan Standar Kompetensi Kerja bidang Kominfo	5				
			Jumlah LSP bidang Kominfo di Badan Labang SDM yang diterbitkan keahliannya	2				
			Persentase (%) tingkat kelulusan ASN Kemkominfo yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	90				
			Persentase (%) peserta program basiswca S2 dan S3 bidang TIK Digital yang lulus tepat waktu	90				
			Persentase (%) Penyediaan Pembangunan Prasarana Sekolah Tinggi Multi Media	100				
			Jumlah rencana aksi pengembangan SDM Digital berdasarkan hasil pengukuran indeks masyarakat digital	1				
			Jumlah kegiatan koordinasi ekosistem SDM Digital yang dilaksanakan	3				
			Persentase (%) keberhasilan layanan platform SDM digital nasional	90				
			Realisasi Target PNPBP Psadiklat	100				
			Realisasi Target PNPBP HPPTIK	100				
10	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Meningkatnya Literasi Digital Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital	5500000	IKK	450.000.000,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
11	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Meningkatnya Kapabilitas dan Kualitas Lembaga Pendidikan dan Pelatihan bidang TIK Digital	Persentase (%) masa tunggu lulusan yang bekerja dalam waktu 6 bulan di bidang Multi Media	40	IKK	112.903.430,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Jumlah peserta pelatihan SKKNI bidang Komunikasi dan Informatika yang tersertifikasi di STMM	400				
			Persentase (%) peningkatan kompetensi SDM Internal STMM	90				
			Realisasi Target PNPBP STMM	100				
12	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Terselenggaranya Penginderaan Data Pribadi di Semua Sektor	Jumlah kebijakan/regulasi turunan terkait implementasi UU PDP	1	IKK	12.012.000,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
		Terselenggaranya implementasi UU ITE dan PP 71 Tahun 2019	Jumlah konten internet (media sosial, konten negatif, website) yang bisa ditangani per tahun (konten)	200000	IKK	70.328.425,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Jumlah regulasi/kebijakan dan turunan PP 71 tahun 2019	3				
			Jumlah Penyedia Layanan Digital Terpercaya Indonesia yang sudah diakui dan diaudit	10				
		Terselenggaranya Pengendalian Penyelenggara Sistem Elektronik	Maksimal Durasi Pemutusan Akses/Pemblokiran PSE terhadap Konten yang melanggar ketentuan perundang-undangan	3	IKK	47.560.547,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Persentase (%) Ketersediaan Layanan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk (PSEI Induk)	94,4				
			Persentase (%) tingkat kepuasan PSE terhadap PP 71 tahun 2019	80				
			Persentase (%) penanganan aduan tidak pidana ITE	100				
		Terselenggaranya Layanan Klasifikasi Game yang handal	Terselenggaranya Layanan Klasifikasi Gim	1	IKK	8.200.000,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
13	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Meningkatnya adopsi teknologi digital di sektor dan kawasan strategis	Persentase (%) tingkat adopsi teknologi digital di sektor strategis (kumulatif) a. Pertanian b. Pariwisata c. Logistik d. Maritim e. Pendidikan f. Kesehatan	100	IKK	45.200.000,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Persentase (%) UMKM produsen (sektor pengolahan) yang active selling	10				
			Persentase (%) Kawasan Prioritas yang difasilitasi untuk adopsi teknologi digital (kumulatif) a. 12 KEK b. 13 SKPT c. 10 Kawasan Pariwisata Prioritas d. 30 Kawasan IKM	70				
		Meningkatnya Pengembangan Startup Digital	Jumlah Business Matchmaking Startup Digital	80	IKK	78.763.500,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Jumlah Startup Digital yang Aktif	70				
			Jumlah Start up bidang gim yang berkembang bisnisnya dilihat dari jumlah download/peningkatan pendapatan/jumlah produksi game/jumlah kerjasama bisnis	40				
14	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Terselenggaranya kebijakan dan pengelolaan aplikasi layanan SPBE	Jumlah Regulasi / Kebijakan dan turunan Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE	4	IKK	16.972.070,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Jumlah Jabatan Fungsional Bidang SPBE yang diarahkan	1				
			Persentase (%) sekolah yang menggunakan aplikasi (sistem elektronik) bidang pendidikan (e-pendidikan) dari total 1000 sekolah	100				
			Persentase (%) aplikasi generik yang dikembangkan multiplatform (kumulatif)	70				
			Persentase (%) Capaian PNPBP Bidang Aplikasi Informatika Tahun 2023	100				
		Terselenggaranya penyelenggaraan data center nasional terpusat dan interoperabilitas	Persentase (%) pembangunan pusat data nasional 1 Cikarang sampai pada tahap konstruksi berdasarkan dokumen kontrak	100	IKK	1.502.510.598,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Persentase (%) pembangunan pusat data nasional 2 Batam sampai pada tahap konstruksi berdasarkan proyek tin teknis PDN Batam	50				
			Persentase (%) KLD yang memanfaatkan cloud pemerintah (kumulatif) dari 629 K/LD	55				

			Persentase (%) layanan cloud pemerintah dan interoperabilitas SPBE (kumulatif)	100				
			Persentase (%) pembentukan kelembagaan pengelola pusat data nasional sampai pada tahap terbentuknya SOP, utukelola, kajian BLU	100				
			Persentase (%) sektor yang telah mengimplementasi Interoperabilitas Nasional Satu Data Indonesia (kumulatif)	90				
			Persentase (%) K/L/Prov yang terhubung jaringan anta pemerintah (kumulatif)	90				
		Terwujudnya pemanfaatan layanan aplikasi pemerintahan pusat dan daerah yang terintegrasi	Persentase (%) Aplikasi generik yang disediakan secara multipatform (harmonisasi, pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan - kumulatif)	70	IKK	7.526.732,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Teknologi Informasi pada SPPT-TI	9				
15	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Meningkatnya daerah yang menerapkan konsep smart city	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi menyusun masterplan smart city	50	IKK	8.300.000,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Jumlah hasil evaluasi implementasi smart city terhadap kota/kab yang terpilih pada periode 2017-2022 (kumulatif)	248				
16	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Terwujudnya Penyelenggaraan Sistem dan Layanan Telekomunikasi untuk Kebutuhan Kedarifatan dan Kebencanaan	Jumlah Kab/Kota yang terlayani Penyisihan Sistem Informasi Kebencanaan melalui Pelanggan Telekomunikasi dan Penyiaran	514	IKK	12.450.000,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Jumlah Kab/Kota yang Mengimplementasikan Layanan Panggilan Darurat 112 Secara Mandiri	26				
			Jumlah Dokumen Dukungan Penerapan Jaringan Bergekan Pindekar untuk Pelindungan Publik dan Penanggulangan Bencana	1				
			Jumlah Kajian terkait Penyediaan Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana (PAMPIB)	1				
17	Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik	Terwujudnya Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Menjadi Pusat Pengujian Perangkat TIK	Persentase pemenuhan Prasarana Laboratorium Pengujian Alat Perangkat Pengujian	100	IKK	2.105.669,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Persentase (%) Pengembangan laboratorium Pengujian Perangkat TIK	100				
		Terwujudnya standarisasi alat dan perangkat komunikasi	Jumlah regulasi dan/atau standarisasi teknologi alat dan perangkat telekomunikasi dan TIK	8	IKK	18.400.558,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Penetapan balai uji dalam negeri	1				
			Persentase (%) keberhasilan pengolahan data IMEI di dalam sistem CEIR	90				
		Meningkatnya kualitas layanan publik bidang sumber daya perangkat pos dan informatika	Persentase (%) Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang Diberikan Tepat Waktu	82,5	IKK	22.796.929,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Persentase (%) Capaian target PNDP BHP Frekuensi radio (Rp.19.738.203.990.000)	100				
			Indeks minimum integrasi pelayanan publik atas pelayanan spektrum frekuensi radio (SFR) dan sertifikasi operator radio	8,2				
			Indeks minimum kepuasan masyarakat atas pelayanan spektrum frekuensi radio (SFR) dan Sertifikasi Operator Radio	3,5				
			Jumlah perizinan SFR bagi Nelayan (Marlin On The Spot) setiap tahun	1100				
			Jumlah sertifikasi operator radio bagi nelayan	1300				
			Persentase capaian ISR One Day Service (melalui Online Single Submission)	94				
			Persentase (%) Validitas Data Spektrum Frekuensi Radio	95				
			Nilai LKE Zona Integrasi menuju WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) Tahun 2024	90				
			Persentase capaian target PNDP bidang sertifikasi perangkat telekomunikasi	100				
			Indeks minimum integrasi pelayanan publik atas pelayanan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi	8,2				
			Indeks minimum kepuasan masyarakat atas pelayanan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi	3,5				
			Indeks minimum integrasi pelayanan publik pengujian perangkat TIK	8,2				
			Indeks minimum Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengujian perangkat TIK	3,5				
			Jumlah sertifikasi operator radio berbasis CAT	8000				
		Meningkatkan daya saing dan kualitas laboratorium BRPPT sesuai standar Internasional	Persentase pemenuhan standar mutu International Organization for Standardization (ISO)	100	IKK	14.216.081,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Persentase (%) Penyelidikan Kalibrasi Alat Ukur	96				
			Persentase (%) Penyelidikan Pengujian Perangkat Telekomunikasi	96				
			Jumlah kerja sama yang terjalin dengan organisasi yang terakreditasi	1				
			Persentase (%) Penyelidikan Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Ukur Perangkat TIK BRPPT	90				
18	Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio	Jumlah penambahahan spektrum frekuensi radio untuk broadband	990	IKP	248.808.193,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Penyelesaian regulasi terkait spektrum frekuensi yang mendukung peningkatan konektivitas broadband	2				
			Persentase Optimalisasi dan penyisihan spektrum frekuensi radio untuk public service dan pemerintah	100				
			Jumlah Masterplan Spektrum Frekuensi Radio untuk Kebutuhan Digitalisasi Penyiaran	1				
		Pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase (%) penanganan gangguan spektrum yang mengganggu komunikasi terkait keselamatan	100	IKP	223.946.313,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Jumlah penyediaan perangkat untuk pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio (unit)	41				
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan dan Pengelolaan PNDP	Indeks Minimum Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran	3,5	IKP	83.192.379,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Bidang Aplikasi Informatika					
			Indeks minimum integrasi pelayanan publik bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran	8,2				
			Jumlah target PNDP bidang pos, penyiaran, dan telekomunikasi	1.229.046.744,00				

			Indeks minimum integritas pelayanan publik bidang frekuensi dan perangkat pos dan informatika	8,2				
			Indeks minimum Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik bidang frekuensi dan perangkat pos dan informatika	3,5				
			Persentase (%) Capaian target PNSBP bidang frekuensi dan perangkat pos dan informatika tahun 2024 (Rp.20.101.709.814.000)	100				
		Meningkatnya pengembangan ekosistem industri perangkat TIK	Jumlah regulasi dan/atau standarisasi teknologi alat dan perangkat telekomunikasi	8	IKP	34.722.308,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Persentase pengembangan laboratorium pusat pengujian perangkat TIK	100				
19	Program Pengabdian Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik	Terwujudnya Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Menjadi Pusat Pengujian Perangkat TIK	Persentase pemenuhan Prasarana Laboratorium Pengujian Alat/Perangkat Pengujian	100	IKK	2.105.669,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Persentase (%) Pengembangan laboratorium Pengujian Perangkat TIK	100				
		Terwujudnya standarisasi alat dan perangkat komunikasi	Jumlah regulasi dan/atau standarisasi teknologi alat dan perangkat telekomunikasi dan TIK	8	IKK	18.400.558,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Berapitan balai uji dalam negeri	1				
			Persentase (%) keberhasilan pengolahan data IMEI di dalam sistem CEIR	90				
		Meningkatnya kualitas layanan publik bidang sumber daya perangkat pos dan informatika	Persentase (%) Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang Diterbitkan Tepat Waktu	82,5	IKK	22.796.929,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Persentase (%) Capaian target PNSBP BHP Frekuensi radio (Rp.19.738.203.990.000)	100				
			Indeks minimum integritas pelayanan publik atas pelayanan spektrum frekuensi radio (SFR) dan sertifikasi operator radio	8,2				
			Indeks minimum kepuasan masyarakat atas pelayanan spektrum frekuensi radio (SFR) dan Sertifikasi Operator Radio	3,5				
			Jumlah perizinan SFR bagi Nelayan (Marine On The Spot) setiap tahun	1100				
			Jumlah sertifikasi operator radio bagi nelayan	1300				
			Persentase capaian ISR One Day Service (melalui Online Single Submission)	94				
			Persentase (%) Validitas Data Spektrum Frekuensi Radio	95				
			Nilai LKE Zona Integrasi menuju WBHM (Wlayah Birokrasi Bersih Melayani) Tahun 2024	90				
			Persentase capaian target PNSBP bidang sertifikasi perangkat telekomunikasi	100				
			Indeks minimum integritas pelayanan publik atas pelayanan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi	8,2				
			Indeks minimum kepuasan masyarakat atas pelayanan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi	3,5				
			Indeks minimum integritas pelayanan publik pengujian perangkat TIK	8,2				
			Indeks minimum Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengujian perangkat TIK	3,5				
			Jumlah sertifikasi operator radio berbasis CAT	8000				
		Meningkatkan daya saing dan kualitas laboratorium BBPPT sesuai standar Internasional	Persentase pemenuhan standar mutu International Organization for Standardization (ISO)	100	IKK	14.216.081,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Persentase (%) Penyelesaian Kalibrasi Alat Ukur	96				
			Persentase (%) Penyelesaian Pengujian Perangkat Telekomunikasi	96				
			Jumlah kerja sama yang terjalin dengan organisasi yang terakreditasi	1				
			Persentase (%) Penyelesaian Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Ukur Perangkat TIK BBPPT	90				
20	Program Pengabdian Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik	Meningkatnya kuantitas penyelenggaraan telekomunikasi, pos dan penyiaran	Persentase (%) Kepuasan penyelenggaraan Pos	100	IKK	28.362.000,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Persentase (%) Kepuasan penyelenggaraan Telekomunikasi	100				
			Persentase (%) Kepuasan penyelenggaraan Penyiaran	100				
			Jumlah target capaian PNSBP BHP Telekomunikasi dan KPUPU (Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal)	179.002.018.000				
		Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran	Indeks Minimum Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik penyelenggaraan telekomunikasi	3,5	IKK	24.033.450,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Indeks Minimum integritas pelayanan publik penyelenggaraan telekomunikasi	8,2				
			Indeks Minimum Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik penyelenggaraan pos	3,5				
			Indeks Minimum integritas pelayanan publik penyelenggaraan pos	8,2				
			Indeks minimum Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik penyelenggaraan penyiaran	3,5				
			Indeks minimum integritas pelayanan publik penyelenggaraan penyiaran	8,2				
			Jumlah target capaian PNSBP Penyiaran	50.044.726.000				
21	Program Pengabdian Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik	Terwujudnya Layanan Publik Bidang Informatika yang handal	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Bidang Aplikasi Informatika	>3,5	IKK	8.000.000,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
22	Program Pengabdian Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik	Terwujudnya optimalisasi dalam rangka penambahan spektrum frekuensi untuk pita lebar	Persentase Rancangan Kebijakan dalam rangka mendukung penambahan SFR untuk layanan broadband sebesar 990 MHz	100	IKK	23.822.761,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Jumlah akumulasi pendaftaran filing satelit baru ke ITU	5				
			Jumlah akumulasi penambahan kapasitas satelit nasional	177,4				
			Jumlah kebijakan nilai spektrum frekuensi radio yang adaptif terhadap industri	1				
			Jumlah Kajian posisi Indonesia dalam sidang koordinasi perbatasan (border coordination) dengan negara tetangga	3				

		Terwujudnya Optimalisasi dan Penyediaan Pita Frekuensi Radio untuk public service	Jumlah lajian teknis penyediaan Pita Frekuensi Radio dalam rangka mendukung Implementasi Jaringan Komunikasi Radio Terintegrasi untuk Keperluan Pemerintah (Government Radio Network)	1	IKK	9.039.487,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Jumlah lajian petunjuk teknis (juktis) penggunaan SFR untuk keperluan maritim	1				
			Jumlah lajian teknis Penentuan alokasi spektrum frekuensi radio untuk keperluan dinas penerbangan	1				
			Jumlah stasiun radio terrestrial yang dimodifikasi/regenerasi	342				
		Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio untuk keperluan digitalisasi penyiaran	Jumlah masterplan spektrum frekuensi radio untuk keperluan penyiaran digital	1	IKK	3.538.561,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
23	Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik	Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penerbitan serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat	Persentase Okupansi penggunaan frekuensi radio di kabupaten/kota	83	IKK	192.145.252,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Persentase pengukuran stasiun radio dan televisi siaran di wilayah kerja	70				
			Persentase jumlah ISR yang termonitor	80				
			Persentase (%) ISR hasil monitoring yang teridentifikasi	90				
			Persentase (%) penerbitan spektrum frekuensi radio	75				
			Persentase (%) penanganan gangguan spektrum frekuensi radio	99				
			Monitoring sertifikat alat perangkat telekomunikasi	6				
			Penerbitan sertifikat alat perangkat telekomunikasi	3				
			Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	88				
			Persentase (%) Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT	100				
			Persentase Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Pating BHP Frekuensi Radio	100				
			Persentase (%) pelaksanaan Sosialisasi dan atau SRC / LRC dan jumlah ISR Maritim relayan	90				
			Persentase (%) pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik	80				
			Persentase (%) Pelaksanaan inspeksi stasiun radio terkait validasi data ISR	90				
		Terwujudnya infrastruktur monitoring dan manajemen spektrum frekuensi radio	Jumlah penyediaan perangkat untuk pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio	41	IKK	223.946.313,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Persentase operasional perangkat Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) untuk mendukung kegiatan monitoring dan penerbitan spektrum frekuensi radio di UPT	95				
			Persentase Terjaminnya Operasional Aplikasi E-Licensing SIMS untuk mendukung Smart Service	99				
			Persentase pengembangan infrastruktur digital licensing dalam mendukung smart service layanan publik Dijeta Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	100				
		Terwujudnya penanganan gangguan frekuensi radio untuk keselamatan	Persentase (%) penanganan gangguan frekuensi radio untuk keselamatan	100	IKK	20.262.152,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Persentase (%) penanganan pelanggaran standar perangkat telekomunikasi	96				
24	Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan broadband di wilayah komersial	Persentase pemetaan Desa/Kelurahan di wilayah non 3T di Indonesia yang akan difasilitasi peningkatan kualitas layanan seluler 4G (total desa berdasarkan konsolidasi data dari sigam dan signal.kominfo.go.id)	100	IKP	108.280.357,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Persentase (%) kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik broadband (Kumulatif)	63				
			Persentase (%) rumah tangga terlayani jaringan internet akses fixed broadband terhadap total rumah tangga	30				
			Persentase (%) tidak lanjut hasil pengowman terhadap Qos, QoE, dan aduan masyarakat	100				
			Rata-rata kecepatan internet mobile broadband di wilayah Indonesia	20				
			Rata-rata kecepatan internet fixed broadband di wilayah Indonesia	25				
		Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital	Persentase populasi yang terjangkau penyiaran TV digital (Kumulatif)	85	IKP	1.679.221.255,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Jumlah Regulasi/Kebijakan terkait Penyiaran Digital dan ataman Pelaksanaanannya	1				
		Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan pos	Persentase (%) kecamatan yang tereskap layanan pos	100	IKP	17.442.876,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Jumlah desain prangko nasional yang diadukan	12				
		Terwujudnya pengembangan High speed Mobile Broadband	Jumlah lokasi yang terkoneksi 5G pada tahap awal implementasi	2	IKP	2.600.000,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
		Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan broadband di wilayah non komersial	Jumlah Desa di Wilayah 3T Yang Mendapatkan Akses Seluler 4G (Kumulatif)	5.025	IKP	8.049.553.324,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Jumlah Lokasi Penyediaan Akses Internet di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar, Kawasan Prioritas, dan Lokasi Layanan Publik (Kumulatif)	22.739				
			Persentase (%) Pemanfaatan Kapasitas Palapa Ring Barat : 60%; Tengah : 50% Timur : 50% dengan Service Level Agreement (SLA) minimal 95%	53				
			Jumlah Sewa Kapasitas Satelit (LC)	22				
			Jumlah Kapasitas Penyediaan Satelit Multifungsi (SATRIA) (Kumulatif)	150				
			Jumlah Solusi Ekosistem Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas masyarakat melalui Pemanfaatan Infrastruktur Dan Penguatan Ekosistem di WPUPI (Kumulatif)	15				
25	Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Meningkatnya kualitas layanan pos, telekomunikasi dan penyiaran yang diterima masyarakat	Persentase (%) Penguatan Pusat Monitoring Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Pemerintahan perangkat, penambahan sistem aduan)	100	IKK	72.230.730,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Persentase (%) tidak lanjut hasil pengowman terhadap Qos/QoE, aduan masyarakat	100				
			Persentase (%) ketersediaan data infrastruktur telekomunikasi, QoS, QoE dan aduan masyarakat	100				
		Meningkatnya Cakupan Konektivitas Jaringan Pita lebar di Wilayah Komersial	Jumlah Rumah Tangga yang Terhubung dengan Jaringan Tetap Pita Lebar	3.000.000	IKK	22.499.627,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Jumlah Kabupaten/Kota yang diberi Pendampingan Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Bersama	2				

			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kemudahan Akses ke Gedung dan Kawasan	1				
			Persentase (%) Kematian yang Terjangkitan Infrastruktur Jaringan Serat Optik Broadband	1				
		Meningkatnya cakupan konektivitas jaringan bergerak seluler di wilayah komersial	Persentase penerapan Desa/Kelurahan di wilayah non 3T di Indonesia yang akan difasilitasi peningkatan kualitas layanan seluler 4G (total desa berdasarkan konsolidasi data dari signal dan signal.kominfo.go.id)	50	IKK	1.035.301,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
		Terwujudnya industri telekomunikasi yang sehat dan berkelanjutan	Persentase Penggunaan IPv6 pada trafik internet Indonesia	5	IKK	12.514.699,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Persentase pertumbuhan pendapatan penyelenggara telekomunikasi	0,5				
26	Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Meningkatnya infrastruktur penyiaran digital dalam rangka mendukung ASO	Jumlah Pemecintah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Dalam Pembentukan Ekosistem Siaran TV Digital Baru	10	IKK	1.670.978.921,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Jumlah Lokasi Tersedia Sistem Pemancar, Studio Sistem Penyiaran TV Digital, dan Dokumen Pelaksanaan Capacity Building	62				
			Jumlah Dashboard Pembangunan, Jangkauan, dan Utilisasi Infrastruktur Penyiaran Publik	1				
			Jumlah Study Awal Rencana Pengembangan Infrastruktur Penyiaran Televisi Digital Publik di IKN	1				
		Terlaksananya migrasi TV terestrial digital dan implementasi radio terestrial digital	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait tv digital dan radio digital	3	IKK	8.242.334,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
27	Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Terlaksananya Pengelolaan Rencana Strategis, Hukum dan Sumber Daya yang Unggul	Pencapaian Opini Atas Laporan Keuangan Wajar Tanpa Penguculan	1	IKK	282.637.343,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Persentase Realisasi Belanja dan PSNP dari Target	95				
			Jumlah layanan pengelolaan sumber daya dan administrasi yang unggul	1				
28	Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Terwujudnya Pengembangan High Speed Mobile Broadband	Jumlah lokasi yang terkoneksi 5G pada tahap awal implementasi	2	IKK	2.600.000,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
29	Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Meningkatnya pemerataan layanan dan pengembangan industri pos universal	Persentase (%) kematian yang terakap layanan pos universal	100	IKK	13.400.950,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Persentase Penyelenggara Pos (nasional) yang menerapkan teknologi manajemen logistik (dari total 699)	5				
			Jumlah desain perangkat nasional yang disahkan	12				
		Terwujudnya industri pos yang sehat dan berkelanjutan	Persentase kenaikan pendapatan penyelenggara pos secara nasional	2,5	IKK	4.041.926,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
30	Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Terlaksananya penyediaan dan pengelolaan layanan telekomunikasi dan informasi untuk badan usaha	Persentase Pemanfaatan Palapa Ring Barat : 60%, Tengah : 50% Timur : 50%	53	IKK	66.000.000,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
31	Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Terlaksananya Penyediaan & Pengelolaan Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Masyarakat dan Pemerintah	Jumlah Solusi Ekosistem Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas Masyarakat Melalui Pemanfaatan Infrastruktur dan Penguatan Ekosistem di WPU/UT	15	IKK	82.683.953,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
32	Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	terlaksananya Akreditasi Telekomunikasi dan Informasi di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informa	Jumlah Lokasi Yang Terjangkitan Jaringan Bergerak Seluler (Base Transceiver Station/Lantiale 4G) di Daerah 3T (Kumulatif)	5.055	IKK	7.618.232.628,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Jumlah Kapasitas Penyediaan Sadel Multifungsi (SATRIA) (Kumulatif)	150				
			Jumlah Sewa Kapasitas Sadelil (Leased Capacity) 29,7 Gbps	22				
			Jumlah Lokasi Penyediaan Akses Internet di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar, Kawasan Prioritas, dan Lokasi Layanan Publik (kumulatif)	22.739				
			Persentase (%) rata-rata SLA 95%-di 57 Kab-Kota Palapa Ring	95				
33	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikominfo Tahun 2023	84	IKP	1.798.446.977,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Nilai Opini HPK atas Laporan Keuangan Kemendikominfo TA 2022	WTP				
			Nilai SPP Kemendikominfo Tahun 2023	3,80				
			Nilai Kinerja Anggaran Kemendikominfo Tahun 2023	88				
			Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan Dukungan Manajemen Tahun 2023	3,8				
			Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Dijen SDPPI Tahun 2023	84				
			Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Dijen PPI Tahun 2023	84				
			Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Dijen APTIKA Tahun 2023	84				
			Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Dijen IKP Tahun 2023	84				
			Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Balitbang SDM Tahun 2023	84				
			Jumlah layanan pegawai terhadap layanan keuangan BAKTI	12				
			Persentase Batu Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan HPK di Kemendikominfo	1				
			Persentase Penyelidikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Kemendikominfo	70				
			Persentase Penyelidikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Sebelumnya di Kemendikominfo	30				
			Nilai Penguatan Pengawasan di Kemendikominfo	5				
			Nilai RB di Ijen	84				
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Kemendikominfo	72				
34	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BLSDM yang Bereth dan Efisien	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi BLSDM Tahun 2024	84	IKK	135.045.877,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) BLSDM Tahun 2024	75				
			Persentase (%) Batu Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di BLSDM Tahun 2024	1				
			Nilai Kinerja Anggaran Badan Litbang SDM Tahun 2024	88				
			Nilai SPP BLSDM Tahun 2024	3,50				

			Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan Dukungan Manajemen BLSDM Tahun 2024	3,8				
			Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di BLSDM pada Tahun 2024	70				
			Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di BLSDM pada Tahun 2024	30				
35	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen IKP yang Berarah dan Efisien	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen IKP Tahun 2024	84	IKK	102.604.049,00	APHN	Januari s.d Desember 2024
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Ditjen IKP Tahun 2024	75				
			Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Ditjen IKP Tahun 2024	1				
			Nilai Kinerja Anggaran Ditjen IKP Tahun 2024	88				
			Nilai SPJP Ditjen IKP Tahun 2024	3,80				
			Indeks Kepuasan Pegawai terhadap layanan Dukungan Manajemen Ditjen IKP Tahun 2024	3,80				
			Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di Ditjen IKP Tahun 2024	70				
			Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di Ditjen IKP Tahun 2024	30				
36	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya kualitas tata kelola Ditjen APTIKA yang bersih dan efisien	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen APTIKA Tahun 2024	84	IKK	104.299.086,00	APHN	Januari s.d Desember 2024
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Ditjen APTIKA Tahun 2024	75				
			Nilai Kinerja Anggaran Ditjen APTIKA Tahun 2024	88				
			Persentase batas tertinggi temuan hasil pemeriksaan BPK di Ditjen Aptika Tahun 2024	1				
			Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada tahun Berjalan di Ditjen Aptika Tahun 2024	79				
			Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Sebelumnya di Ditjen APTIKA Tahun 2024	30				
			Nilai SPJP Ditjen APTIKA Tahun 2024	3,50				
			Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan Dukungan Manajemen Ditjen APTIKA Tahun 2024	3,50				
37	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya kualitas tata kelola Ditjen PPI yang transparan,akuntabel, bersih dan efisien	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen PPI Tahun 2023	84	IKK	232.543.977,00	APHN	Januari s.d Desember 2024
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Ditjen PPI Tahun 2023	75				
			Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Ditjen PPI Tahun 2023	1				
			Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Ditjen PPI pada Tahun 2023	70				
			Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Pada Sebelumnya di Ditjen PPI pada Tahun 2023	30				
			Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PPI Tahun 2023	88				
			Nilai SPJP Ditjen PPI Tahun 2023	3,50				
			Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan Dukungan Manajemen Ditjen PPI Tahun 2023	3,80				
38	Program Dukungan Manajemen	Terealisasiya harmonisasi regulasi untuk mendukung peningkatan konektivitas pita lebar	Jumlah Penyelesaian regulasi terkait spektrum frekuensi yang mendukung peningkatan konektivitas broadband	2	IKK	7.691.093,00	APHN	Januari s.d Desember 2024
		Meningkatnya kualitas tata kelola internal Ditjen SDPPI	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen SDPPI Tahun 2024	84	IKK	708.768.981,00	APHN	Januari s.d Desember 2024
			Nilai AKIP Ditjen SDPPI Tahun 2024	75				
			Persentase Batas tertinggi temuan hasil pemeriksaan BPK atas LK Ditjen SDPPI Tahun 2024 dibanding total realisasi anggaran Ditjen SDPPI tahun 2024	1				
			Peningkatan Kompetensi SDM Ditjen SDPPI	100				
			Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2024	88				
			Nilai SPJP Ditjen SDPPI Tahun 2024	3,8				
			Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan Dukungan Manajemen Ditjen SDPPI Tahun 2024	3,8				
39	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya kualitas manajemen keuangan dan BMN yang terarah dan sesuai peraturan perundangan BAKTI	Jumlah layanan pegawai terhadap layanan keuangan BAKTI	12	IKK	2.324.701,00	APHN	Januari s.d Desember 2024
40	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Inspektori Jenderal yang Efektif dan Efisien	Persentase Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Ijen	1	IKK	41.495.261,00	APHN	Januari s.d Desember 2024
			Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Ijen	70				
			Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Sebelumnya di Ijen	30				
			Nilai RB di Ijen	84				
			Nilai SPJP di Ijen	3,50				
			Nilai AKIP di Ijen	75				
			Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Ijen	88				
			Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Dukungan Manajemen di Ijen	3,8				
41	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya kualitas manajemen keuangan dan BMN yang terarah dan sesuai peraturan perundangan	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2024	88	IKK	237.511.288,00	APHN	Januari s.d Desember 2024
			Jumlah laporan keuangan Kementerian Kominfo yang dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	57				
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara Kementerian Kominfo yang dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan SIMAK BMN	13				

			Presentase (%) batas tertinggi temuan realisasi anggaran SETIEN berdasarkan hasil pengawasan BPK	1				
			Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan keuangan	85				
			Nilai SPIP Sekretariat Jenderal Tahun 2024	3,80				
		Meningkatnya kualitas tata kelola layanan Umum	Indeks Kualitas Pengelolaan Pengaduan Burang dan Jasa Kemkominfo Tahun 2024	80	BKK	26.074.250,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Presentase (%) Capaian Realisasi Rencana BMN	100				
			Presentase (%) terlaksananya renovasi sarana dan prasarana	100				
			Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Biro umum	3,80				
			Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan Dukungan Manajemen Tahun 2024	3,99				
			Nilai Pengawasan Kuntipap di Tingkat Kementerian	82				
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sekretariat KIP yang Bersih dan Efisien	Indeks kepuasan layanan dukungan manajemen Sekretariat KIP tahun 2023	3,8	BKK	2.799.380,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Nilai Kinerja Anggaran KIP Tahun 2023	88				
			Presentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun 2023 di Sekretariat KIP	1				
			Presentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan pada Tahun 2023 di Sekretariat KIP	70				
			Presentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya pada Tahun 2023 di Sekretariat KIP	30				
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sekretariat KPI yang Bersih dan Efisien	Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat KPI tahun 2023	3,75	BKK	1.564.702,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat KPI Tahun 2023	87				
			Presentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun 2023 di Sekretariat KPI	1				
			Presentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan pada Tahun 2023 di Sekretariat KPI	70				
			Presentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya pada Tahun 2023 di Sekretariat KPI	30				
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sekretariat Dewan Pers yang Bersih dan Efisien	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Sekretariat Dewan Pers Tahun 2023	3,76	BKK	2.525.454,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Nilai Kinerja Anggaran Dewan Pers Tahun 2023	87				
			Presentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun 2023 di Sekretariat Dewan Pers	1				
			Presentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan pada Tahun 2023 di Sekretariat Dewan Pers	70				
			Presentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya pada Tahun 2023 di Sekretariat Dewan Pers	30				
42	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya Kompetensi SDM Kominfo bidang digital, managerial dan teknis.	Presentase (%) kebutuhan SDM yang terpenuhi berdasarkan kriteria kompetensi	60	BKK	16.548.334,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Indeks Sistem Merit	344				
			Indeks Profesionalisme ASN	82				
		Meningkatnya kualitas tata kelola dan organisasi Kominfo	Jumlah RPM SOTK Baru	5	BKK	5.922.125,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Presentase Penyelesaian Manajemen Jabatan	100				
			Presentase Penyelesaian Proses Bisnis Restrukturisasi Organisasi	100				
			Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2024 berdasarkan Tim Penilaian Evaluator Internal : a. RB General b.RB Tematik	79,03				
			Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Biro Kepegawaian dan Organisasi Tahun 2024	3,85				
43	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya kualitas tata kelola dan layanan pengawasan Internal	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Pengawasan Internal di Kemkominfo	3,6	BKK	4.699.926,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Presentase Pembangunan Continuous Auditing and Continuous Monitoring di Kemkominfo	100				
			Level Kapabilitas APIP di Kemkominfo	3				
			Nilai Penguatan Pengawasan di Kemkominfo	5				
		Meningkatnya kualitas pengawasan pada seluruh unit kerja	Presentase Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Dijen SDPPI	1	BKK	21.535.085,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Dijen SDPPI	70				
			Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Sebelumnya di Dijen SDPPI	30				
			Nilai RB di Dijen SDPPI	84				
			Nilai SPIP di Dijen SDPPI	3,50				
			Nilai AKIP di Dijen SDPPI	75				
			Presentase Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Dijen PPI, Ijen, dan BAKTI	1				
			Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Dijen PPI, Ijen, dan BAKTI	70				
			Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Sebelumnya di Dijen PPI, Ijen, dan BAKTI	30				
			Nilai RB di Dijen PPI, Ijen, dan BAKTI	84				
			Nilai SPIP di Dijen PPI, Ijen, dan BAKTI	3,50				

			Nilai AKIP di Ditjen PPI, Ijrs, dan BAKTI	75				
			Persentase Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Ditjen IKP dan BLSDM	1				
			Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Ditjen IKP dan BLSDM	70				
			Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Sebelumnya di Ditjen IKP dan BLSDM	30				
			Nilai RB di Ditjen IKP dan BLSDM	84				
			Nilai SPJP di Ditjen IKP dan BLSDM	3,50				
			Nilai AKIP di Ditjen IKP dan BLSDM	75				
			Persentase Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Ditjen Aprika dan Sejen	1				
			Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Ditjen Aprika dan Sejen	70				
			Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Sebelumnya di Ditjen Aprika dan Sejen	30				
			Nilai RB di Ditjen Aprika dan Sejen	84				
			Nilai SPJP di Ditjen Aprika dan Sejen	3,50				
			Nilai AKIP di Ditjen Aprika dan Sejen	75				
44	Program Dukungan Manajemen	Terkelompoknya harmonisasi regulasi dan layanan hukum di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika	Persentase (%) Pemangatan kasus hukum di lingkungan Kemen Kominfo	1,00	BKK	9.173.790,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2024	1,00				
			Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024	1,00				
			Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Kominfo Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1,00				
			Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Biro Hukum	1,00				
45	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya kualitas program/proyek prioritas bidang kominfo dengan dukungan kerja sama multilateral, regional, dan	Persentase (%) kerja sama internasional bidang Kominfo mendukung kebijakan atau program prioritas	100	BKK	19.600.000,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Persentase (%) kerja sama internasional bidang Kominfo baru yang berhasil dimisiasi	100				
			Persentase (%) usulan dan partisipasi Indonesia pada proyek bidang Kominfo di organisasi internasional	100				
			Persentase (%) proposal bidang TIK yang diterima pada organisasi internasional	100				
			Indeks Kepuasan Pegawai terhadap layanan Pusat Kelengkapan Internasional	4,00				
46	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian Kominfo	Nilai akuntabilitas kinerja Kominfo	75	BKK	47.625.400,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal	75				
			Persentase rencana kerjasama yang ditandatangani	100				
47	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya kualitas pengolahan informasi terkait Kementerian Kominfo	Nilai Indeks Persepsi Publik terhadap Program Kementerian Kominfo (skala 1-5)	4,6	BKK	23.926.624,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Nilai Pemeringkatan PPID Kominfo oleh Komisi Informasi Pusat (KIP)	95				
			Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Kominfo Untuk Area Tata Laksana di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2023	0,60				
			Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Biro Hubungan Masyarakat Tahun 2023	4,25				
			Jumlah masyarakat yang mengakses informasi dari Kementerian Kominfo	38000000				
48	Program Dukungan Manajemen	Tervujudnya transformasi digital layanan administrasi (smart administration) di Kementerian Kominfo	Indeks SPBE Tahun 2023	4,5	BKK	44.207.586,00	APBN	Januari s.d Desember 2024
			Persentase (%) Rata-Rata Pemenuhan SLA Layanan PDSI	90				
			Persentase (%) Penerapan Kominfo Smart Services	90				
			Tingkat Downtime Sistem TIK Kemkominfo yang dikelola PDSI	1				